



HARI GURU NASIONAL 2025: PENGUATAN PERAN GURU DALAM PENDIDIKAN INKLUSIF

Fieka Nurul Arifa*

Abstrak

Peringatan Hari Guru Nasional 2025 dengan tema “Guru Hebat, Indonesia Kuat” menekankan peran guru sebagai pusat transformasi pendidikan, termasuk dalam pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Tulisan ini mengkaji penguatan guru dalam pendidikan inklusif pada momentum Hari Guru Nasional. Guru memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar, menerapkan strategi diferensiasi, membangun lingkungan kelas nondiskriminatif, serta berkolaborasi dengan orang tua dan profesional pendukung. Perluasan akses pendidikan inklusif perlu didukung dengan penguatan guru melalui pelatihan berkelanjutan, pemerataan guru pendamping khusus, penyediaan sarana-prasarana aksesibel, dan integrasi teknologi. Komisi X DPR RI dalam legislasi, pengawasan, dan penganggaran penting untuk menjamin kualitas dan keberlanjutan layanan inklusif, sehingga setiap anak dapat mengakses pendidikan yang adil, bermakna, dan efektif. Jaminan ini juga perlu diperkuat melalui revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendahuluan

Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 25 November 2025 dengan tema “Guru Hebat, Indonesia Kuat” mengingatkan bahwa kekuatan bangsa terletak pada kualitas pendidikannya. Tema ini relevan bukan hanya sebagai penghargaan simbolis, tetapi sebagai pengingat bahwa guru berperan menentukan sejauh mana sistem pendidikan dapat menjangkau seluruh anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Pendidikan inklusif tidak hanya bertujuan menyatukan ABK di ruang kelas reguler, tetapi juga memastikan bahwa mereka mendapat pendidikan yang bermakna dan berkualitas (Nusaibah *et al.*, 2025). Pendidikan inklusif adalah wujud konkret dari keadilan pendidikan, bukan sekadar membuka gerbang sekolah untuk ABK, tetapi memastikan mereka mendapatkan layanan pembelajaran yang bermakna, aksesibilitas, dan dukungan sesuai kebutuhan mereka.

Tema “Guru Hebat, Indonesia Kuat” memosisikan guru sebagai pusat transformasi pendidikan. Dalam kerangka inklusi, “guru hebat” berarti guru yang mampu mengidentifikasi kebutuhan diversifikasi peserta didik, menerapkan strategi diferensiasi, membangun budaya kelas yang nondiskriminatif, serta berkolaborasi lintas profesi untuk memberikan layanan optimal bagi ABK. Untuk itu, penguatan guru harus terus dilakukan agar mereka mampu memberikan layanan pembelajaran yang responsif, adil, dan bermakna

*) Analisis Legislatif Ahli Muda Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Email: fieka.arifa@dpr.go.id

bagi semua peserta didik, yang pada akhirnya menjadi fondasi utama keberhasilan implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. Tulisan ini mengkaji tentang penguatan guru dalam pendidikan inklusif pada momentum Hari Guru Nasional 2025.

Gambaran Terkini Akses ABK pada Sekolah Inklusif

Per September 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat bahwa jumlah peserta didik penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 363.921 ABK, di mana 199.375 di antaranya menempuh pendidikan pada Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) (Savitri, 2025). SPPI tidak hanya mencakup jalur pendidikan formal pada sekolah umum, tetapi juga pada pendidikan kejuruan, serta program pendidikan non-formal. Adapun jumlah SPPI pada periode yang sama mencapai 60.910 sekolah, meningkat sekitar 23% dibandingkan data Juni 2024 yang berjumlah 42.262 SPPI (Savitri, 2025).

Besarnya jumlah peserta didik penyandang disabilitas yang terlayani serta bertambahnya jumlah SPPI menunjukkan adanya perluasan akses pendidikan inklusif di berbagai jenjang dan satuan pendidikan. Lonjakan 23% SPPI dalam kurun waktu satu tahun menandai semakin banyaknya sekolah yang telah siap, baik secara regulasi maupun kelembagaan, untuk menerima dan mendampingi ABK. Namun, bertambahnya SPPI juga menimbulkan kebutuhan baru yakni peningkatan kapasitas guru, ketersediaan layanan pendukung seperti guru pendamping khusus (GPK), aksesibilitas sarana-prasarana, serta mekanisme asesmen yang lebih adaptif. Dengan demikian, data tersebut tidak hanya mencerminkan kemajuan, tetapi juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan pusat untuk memperkuat kualitas layanan inklusif agar perluasan akses benar-benar sejalan dengan peningkatan mutu pembelajaran bagi ABK.

Peran Sentral Guru dalam Pendidikan Inklusif

Guru memegang peran strategis dalam keberhasilan penerapan pendidikan inklusif. Mereka bukan hanya penyampai pengetahuan, tetapi juga fasilitator kebutuhan belajar beragam yang dimiliki peserta didik. Peran guru meliputi: *pertama*, melakukan identifikasi dan asesmen awal. Guru harus mampu melakukan asesmen awal untuk mengetahui karakteristik belajar peserta didik terutama bagi ABK. Asesmen ini membantu guru menentukan pendekatan, strategi, dan layanan adaptif yang diperlukan, termasuk modifikasi pembelajaran dan kebutuhan pendampingan. *Kedua*, menerapkan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi merupakan fondasi dalam kelas inklusif. Pembelajaran berdiferensiasi berbeda dari pembelajaran individual bagi ABK karena tidak dilakukan secara satu per satu, melainkan memungkinkan peserta didik belajar dalam kelompok besar, kecil, maupun secara mandiri (Kemendikbudristek, 2021). Guru perlu merancang pembelajaran yang menyesuaikan capaian kompetensi, gaya belajar, dan kebutuhan khusus ABK. Hal ini mencakup penyederhanaan materi, penggunaan metode multisensori, hingga pemanfaatan teknologi bantu.

Ketiga, menciptakan lingkungan belajar ramah disabilitas. Guru bertanggung jawab membangun atmosfer kelas yang aman, nyaman, bebas stigma, serta mendukung interaksi positif antarsiswa. Lingkungan yang inklusif membantu ABK berkembang secara akademik dan sosial-emosional. *Keempat*, kolaborasi dengan orang tua dan profesional. Guru dalam pendidikan inklusif harus bekerja sama dengan orang tua, terapis, psikolog, dan guru pendamping khusus (GPK) untuk menyusun Rencana Pembelajaran Individual (RPI) atau adaptasi kurikulum sesuai kebutuhan ABK. Kolaborasi yang efektif akan memastikan bahwa ABK menerima dukungan yang konsisten dan berkelanjutan, baik di sekolah maupun di rumah (Oktavia *et al.*, 2025). *Kelima*, menjadi advokat pendidikan inklusif. Guru juga berperan sebagai advokat yang memperjuangkan keberadaan dan hak ABK agar mendapatkan dukungan, penyesuaian, dan layanan yang diperlukan di lingkungan sekolah.

Langkah Strategis Penguatan Peran Guru

Dalam implementasinya, pendidikan inklusif mengalami beberapa tantangan, di antaranya, terbatasnya jumlah GPK di banyak daerah dan belum meratanya pelatihan guru tentang inklusi. Data per Desember 2023, dari 40.164 SPPI baru hanya ada 5.956 sekolah atau 14,83 persen dari total sekolah yang memiliki GPK (Ihsan, 2024). Guna menjawab tantangan tersebut, Kemendikdasmen pada 2025 menyiapkan pelatihan khusus guru vokasi dan guru umum untuk pendidikan inklusif. Pelatihan ini tidak hanya berupa teori, tetapi juga modul praktik yang komprehensif, seperti cara mendampingi ABK di kelas, menyusun RPI, dan menggunakan teknologi inklusif. Program ini akan diterapkan secara nasional mulai 2026 (Muhammad, 2025).

Selain pelatihan, kebijakan redistribusi guru aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) telah dilakukan untuk mendukung pemerataan guru berkualitas di berbagai daerah, termasuk daerah terpencil. Reformasi penataan guru ini diharapkan dapat memastikan bahwa layanan inklusif dijalankan dengan baik oleh tenaga pendidik yang kompeten, tidak hanya di sekolah-sekolah perkotaan (Parady, 2025).

Digitalisasi pembelajaran juga menjadi bagian penting dari penguatan layanan. Pada 2025, Presiden meluncurkan program distribusi perangkat digital untuk 288.000 sekolah, meliputi laptop, papan interaktif, dan konten pembelajaran digital (Nazaruddin, 2025). Peluncuran perangkat digital tersebut juga disertai dengan pelatihan bagi guru dengan kesadaran bahwa teknologi pendidikan menjadi instrumen penting untuk mendukung modifikasi pembelajaran dan aksesibilitas bagi peserta didik pada umumnya dan ABK pada khususnya.

Meskipun berbagai upaya penguatan telah dilakukan, tantangan pelaksanaan pendidikan inklusif menunjukkan bahwa peningkatan akses belum sepenuhnya sejalan dengan peningkatan mutu layanan. Kesenjangan kapasitas antarsekolah dan antarwilayah masih terlihat jelas, terutama di daerah dengan keterbatasan sumber daya manusia dan

infrastruktur pendidikan. Banyak guru reguler belum memiliki pemahaman yang memadai tentang karakteristik ABK dan strategi pembelajaran adaptif, sementara kebutuhan asesmen yang lebih komprehensif belum selalu dapat dipenuhi karena minimnya tenaga profesional pendukung. Di sisi lain, keberhasilan transformasi digital dalam pendidikan inklusif sangat bergantung pada kesiapan sekolah dalam memanfaatkan perangkat digital secara pedagogis, bukan sekadar administratif. Kondisi ini menegaskan pentingnya kebijakan yang lebih terarah, lintas kementerian, dan berbasis data untuk memastikan bahwa perluasan akses benar-benar diikuti dengan peningkatan kualitas layanan di ruang kelas.

Beberapa langkah strategis untuk memperkuat peran guru dalam pendidikan inklusif antara lain: (1) Pelatihan wajib bagi guru untuk penguasaan pedagogi inklusif, asesmen, dan adaptasi kurikulum yang dilaksanakan secara merata. (2) Penambahan dan pemerataan GPK melalui rekrutmen dan distribusi GPK di sekolah-sekolah yang membuka layanan inklusi. (3) Penyediaan sarana prasarana aksesibel di satuan pendidikan untuk mendukung mobilitas dan pembelajaran ABK. (4) Penguatan kemitraan antara sekolah, orang tua, dan profesional. Kolaborasi integral ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. (5) Pemberdayaan guru sebagai agen perubahan. Dalam hal ini guru diberikan ruang untuk mengembangkan inovasi pembelajaran inklusif. (6) Integrasi teknologi dalam pembelajaran penggunaan aplikasi belajar adaptif, alat bantu digital, dan media multimodal untuk siswa ABK. (7) Kebijakan afirmasi daerah di mana pemerintah daerah didorong menerbitkan peraturan daerah pendidikan inklusif, termasuk dukungan anggaran. Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pendidikan inklusif yang terpadu, di mana guru tidak hanya dilengkapi dengan kompetensi dan sumber daya, tetapi juga didukung oleh kebijakan dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, sehingga setiap ABK dapat belajar secara optimal, merasakan rasa aman, dan berkembang sesuai potensinya.

Penutup

Memperkuat peran guru dalam pendidikan inklusif merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya layanan pendidikan yang adil, bermakna, dan dapat diakses oleh seluruh ABK. Meskipun perluasan SPPI menunjukkan kemajuan signifikan, kualitas pelaksanaan pendidikan inklusif tetap bergantung pada kapasitas guru dalam mengelola keberagaman kebutuhan belajar. Investasi pada pelatihan berkelanjutan, penambahan dan pemerataan GPK, serta penyediaan sarana-prasarana aksesibel harus terus diperkuat sebagai bagian dari strategi nasional penguatan pendidikan inklusif.

Komisi X DPR RI berperan penting untuk memastikan keberlanjutan pendidikan inklusif melalui penyusunan regulasi afirmatif, pengalokasian dana yang tepat sasaran, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan agar benar-benar berpihak pada pemenuhan hak pendidikan bagi ABK. Komisi X DPR RI perlu menguatkan pengaturan pendidikan inklusif melalui revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk

menjamin kesetaraan dan keadilan pendidikan bagi semua. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, dan legislasi yang memperkuat inklusi, pendidikan inklusif di Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu memastikan setiap ABK berkembang sesuai potensinya.

Referensi

- Ihsan, D. (2024, April 2). *Kemendikbud: 40.164 sekolah di Indonesia punya siswa disabilitas*. Kompas.com. <https://bit.ly/4rxkZew>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Prinsip pengembangan pembelajaran berdiferensiasi (Differentiated Instruction) pada Kurikulum Fleksibel sebagai wujud Merdeka Belajar* [Buku Nasmik]. <https://bit.ly/44FP9IZ>
- Muhammad, M. (2025). *Kemendikdasmen siapkan pelatihan guru vokasi untuk pendidikan inklusif*. JPNN. <https://bit.ly/48PuwGs>
- Nazaruddin, A. (2025, Oktober 7). *Kemendikdasmen: Pengiriman papan interaktif ditargetkan selesai Desember*. ANTARA. <https://bit.ly/48dz4Gs>
- Nusaibah, S., Nanariain, D. M. D., & Istiqamah, D. (2025). Pendidikan inklusif dan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus di Indonesia: Tinjauan literatur kritis. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(7), 3229–3240, <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i7.8435>
- Oktavia, N., Khairi, H. I., Putri, E. Y., & Meilana, S. F. (2025). Pendekatan guru dan kolaborasi dengan orang tua serta peran psikolog dalam mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus di kelas reguler untuk siswa sekolah dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(1), 223–228. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i01.21991>
- Parady, R. (2025). *Mendikdasmen dorong pemerataan guru dan penguatan pendidikan inklusif*. Kemendikdasmen. <https://bit.ly/44N2yIX>
- Savitri, D. (2025, November 28). *Mulai 2026, guru dibekali keterampilan membimbing murid penyandang disabilitas*. detikEdu. <https://bit.ly/4owX2kP>
- Triyunanto, C. R. (2025, November 28). *Satuan pendidikan inklusif naik 23%, ini kata Dirjen Vokasi dan PKPLK*. detikEdu. <https://bit.ly/3XtKhN1>

